

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program One Village One Product di Kabupaten Gowa

Latifa Nour Azizah¹, Juwanda Nawawi², A. M. Rusli³

Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar

Corresponding Author: latifanourazizah@gmail.com

Keyword:
Implementation;
Policy;
One Village One
Product Program.

Abstract: *The One Village One Product (OVOP) program is an innovative program to identify lokal products that can be developed and then assisted in market expansion. The OVOP program uses a regional potential development approach to produce a global-class lokal wisdom product but still has regional characteristics by utilizing lokal resources. This article aims to analyze the implementation of the OVOP Program from the aspects of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure carried out by the Industri and Trade Office of Gowa Regency. This writing uses a descriptive method. Data collection techniques using interviews, observation and documentation then the data obtained will be analyzed using qualitative techniques. The results showed that the implementation of the One Village, One Product Program in Gowa Regency has not been carried out effectively due to the absence of Regional Regulations (Perda) made, resulting in unclear procedures in its implementation.*

Kata Kunci:
Implementasi
Kebijakan;
Program One Village
One Product.

Abstrak: Program One Village One Product (OVOP) merupakan program inovatif guna mengidentifikasi suatu produk lokal yang dapat dikembangkan untuk kemudian didampingi dalam perluasan pasar. Program OVOP menggunakan pendekatan pengembangan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal berkelas global namun tetap memiliki ciri khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Program OVOP dilihat dari Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa. Penulisan ini menggunakan metode deksriktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program One Village, One Product di Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan efektif dikarenakan tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat, sehingga terjadi ketidakjelasan prosedur dalam pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah wujud dari kemandirian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang salah satu tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Thahir, 2019). Disisi lain dengan adanya otonomi daerah diharapkan tercipta peningkatan daya saing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahmanurrajjid, 2008). Otonomi daerah juga menjadi pintu gerbang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan daerah dengan berdasar pada nilai dan potensi daerahnya masing-masing. Dengan begitu pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan suatu kebijakan maupun program pembangunan di wilayahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerahnya (Nusantoro, 2011; Ananda, 2018; Yuliani, 2019).

Salah satu program yang bersifat inovatif dewasa ini adalah program one village, one product. Program ini merupakan suatu program bersifat strategis guna mengidentifikasi suatu produk lokal yang dapat dikembangkan untuk kemudian didampingi dalam perluasan pasar produk tersebut. Program one village, one product ini menggunakan pendekatan pengembangan potensi daerah disatu wilayah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal, berkelas global

namun tetap memiliki ciri khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Penggunaan kata satu desa sifatnya tidaklah mengikat, satu desa ini dapat kemudian diperluas skalanya menjadi kecamatan, kabupaten atau kota, walaupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis dimasing-masing daerah.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah otonom diwilayah Indonesia turut serta menjalankan program One Village, One Product. Program ini merupakan sebuah bentuk revitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten gowa, dimana didalam pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat untuk turut serta mengembangkan sebuah produk yang kemudian dimasa yang akan datang produk tersebut akan menjadi produk khas dan kebanggaan wilayah lokal serta Program one village one product pada dasarnya merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Gowa guna meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan sekaligus sebagai salah satu upaya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kabupaten gowa. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan Program One Village, One Product yaitu : pertama, untuk menjalankan program tersebut dibutuhkan peraturan pemerintah yang jelas sebagai pedoman dalam menjalankan program tersebut agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan prosedur saat program tersebut diimplementasikan. Kedua, untuk mengembangkan suatu produk lokal dibutuhkan dukungan dari pelaku industri dan Kerjasama yang baik antar pemerintah, pelaku industri dan masyarakat untuk mencapai tujuan dari program OVOP. Ketiga, produk yang akan dikembangkan ini harus memiliki nilai kompetitif baik dipasal lokal hingga nasional atau bahkan menembus pasar global.

Dasar hukum penerapan Program One Village One Product (OVOP) adalah Keputusan Menteri Perindustrian, Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007, tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra. Regulasi ini sinergi dengan Visi Bupati Gowa dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian pula dengan Misi Bupati Gowa meningkatkan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal serta optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri Gowa. Namun dalam perkembangannya program one village one product sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa terkhusus kepada 14 Sentra IKM yang menjadi mitra binaan dari dinas perindustrian dan perdagangan. Upaya untuk menjalankan dan mengembangkan program One Village, One Product dikabupaten Gowa harusnya dibarengi dengan mengeluarkan kebijakan tersendiri yang menyangkut dengan program tersebut. Belum adanya kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa menyebabkan adanya Ketidakjelasan prosedur pelaksanaan program one village one product. Sejahter ini pemerintah Kabupaten Gowa masih berpedoman pada aturan pemerintah pusat yakni, peraturan menteri perindustrian No, 78 Tahun 2007 Tentang Peningkatan Efektifitas pengembangan industri kecil dan menengah melalui pendekatan satu desa satu produk. Dengan tidak adanya peraturan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten Gowa maka satu-satunya kebijakan yang menjadi pedoman adalah peraturan dari tingkat pusat yang secara substansial kebijakan tersebut bersifat umum dan tidak mendetail berdasarkan ciri khas dan keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di daerah pelaksana program OVOP dalam hal ini Kabupaten Gowa. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Gowa melaksanakan program OVOP tanpa adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatannya adalah studi kasus yakni implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program one village, one product di Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data yang digunakan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis dengan menggunakan Teknik kualitatif. Penentuan informan kunci menggunakan

Teknik purposive sampling yakni Teknik pengambilan sampel subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu dengan asumsi informan memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pelaku industri bata merah, pelaku industri sirup markisa, pelaku industri kerajinan tenun. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana analisis didasarkan pada data yang diperoleh. Berdasarkan teori George Edward III analisis implementasi kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam pembahasan tentang implementasi kebijakan Program *One village one product* yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Gowa akan menggunakan model yang di gagas oleh George Edward yang mana menggunakan 4 Komponen utama dalam menilai berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Adapun keempat komponen tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi serta Struktur Birokrasi. Kemudian untuk melihat secara spesifik bagaimana pelaksanaan program *one village one product* di Kabupaten Gowa akan menggunakan konsep umum *One Village One Product* yang di gagas oleh Prof. Morihiko Hiramatsu sebagai ukuran keberhasilan program tersebut, konsep yang dimaksud yakni; Lokal Tapi Global, Kemandirian dan kreativitas serta pengembangan sumber daya manusia.

Komunikasi dalam Implementasi

Komunikasi, menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjalankan program *one village, one product* mengusung pendekatan dengan mengadakan pameran produk-produk lokal setempat yang diikuti berbagai pelaku industri kecil dan menengah. Namun dalam pelaksanaan pameran produk tersebut tidak penjelasan mengenai program *one village, one product* yang mengakibatkan para pelaku industri hanya menganggap bahwa acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gowa sebatas pameran produk saja. Tidak adanya sosialisasi kepada para pelaku industri mengenai program *one village, one product* mengakibatkan ketidakjelasan dari program tersebut.

Pelaksanaan program *one village one product* di Kabupaten Gowa sejatinya merupakan manifestasi dari visi dan misi yang di rancang oleh pemerintah Kabupaten Gowa di bawah kepemimpinan pada periode pertama Bapak Adnan Puchrita Ichsan yang secara garis besar mencanangkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan perekonomian berbasis pada potensi keunggulan. Dengan adanya visi tersebut kemudian pemerintah Kabupaten Gowa melirik program *One Village One Product* sebagai salah satu opsi yang tepat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat berbasis pada potensi keunggulan. Pengembangan industri lokal masyarakat menjadi satu kunci utama dalam merangsang kemandirian masyarakat, sebagaimana dalam konsep pemerintahan bahwa terciptanya kemandirian masyarakat menjadi poin penting dalam meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Berbicara tentang suatu program kebijakan pemerintah sejatinya perlu aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, karena tanpa adanya aturan yang jelas tentu para implementor terkhusus pelaksana di lapangan akan kesulitan untuk melaksanakan program serta kesulitan untuk menyelaraskan program antar masing-masing sektor. Hal ini lah yang terjadi dalam pelaksanaan program *one village one product*, payung hukum yang menjadi dasar ataupun pedoman adalah aturan langsung dari kementerian perindustrian. Pemerintah Kabupaten Gowa tidak memiliki payung hukum sendiri dalam pelaksanaan Program *One Village One Product* di wilayahnya, hal ini tentu menjadi salah satu poin pertanyaan karena pada

dasarnya sebuah program kebijakan pemerintah wajib memiliki payung hukum. Aturan hukum dalam hal ini peraturan daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan program karena didalamnya terdapat penjabaran yang lebih rinci mengenai dasar, tahapan, metode dan standar pengukuran suatu program.

Pelaksanaan program *one village one product* selama ini berpedoman pada aturan pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Perindustrian No.78 tahun 2007 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industri kecil dan menengah melalui pendekatan satu desa satu produk, didalam peraturan menteri tersebut tentu mengatur tentang tata cara pelaksanaan program *One Village One Product*, namun berpedoman dengan aturan pusat tidak sepenuhnya salah akan tetapi, perlu di pahami bahwa di dalam peraturan pemerintah pusat disusun atau dikonsepsi berdasarkan aturan umum dari pemahaman situasi dan kondisi yang umum pula. Sedangkan Situasi dan kondisi di masing-masing daerah tentu berbeda baik dalam hal sosial, ekonomi, politik di daerah. Disinilah arti penting dari adanya peraturan daerah dimana materi muatan perda berisi tentang seluruh materi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang mampu menampung atau mengakomodir kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan. (Peraturan Menteri Perindustrian No.78 tahun 2007)

Sumber Daya dalam Implementasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentunya diperlukan sumber daya yang mendukung upaya implementasi program *One Village, One product* tersebut. Sumber Daya Manusia adalah salah satu factor terpenting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun industri/ perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan dari sebuah program yang dicanangkan oleh institusi maupun perusahaan/ industri. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi merupakan penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. seperti dalam hal tenaga ahli yang terlibat aktif dalam proses kebijakan, tersedianya fasilitas-fasilitas untuk menunjang kebijakan yang telah ditetapkan serta sistem kesatuan yang memberikan sumber daya kewenangan secara jelas. Sumber daya, menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkup seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran

Sumber daya manusia didalam proses implementasi suatu program kebijakan pemerintah tentu memiliki peranan yang sangat penting, tanpa adanya manusia sebagai penggerak program kebijakan tidak akan terlaksana dan akan berimplikasi pada proses pencapaian tujuan dari program tersebut. Peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan program *one village one product* juga menjadi vital dalam proses pencapaian tujuan program tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki 21 orang pegawai tetap yang mana dari 21 orang tersebut secara khusus *program one village one product* di bawahi oleh bidang perindustrian berkoordinasi dengan bidang promosi dan pengembangan ekspor.

Pelaksanaan *program one village one product* yang di bawahi oleh dinas perdagangan dan perindustrian sejauh ini memiliki kendala terkait sumber daya manusia yang masih terbatas, hal ini terjadi karena segala tanggung jawab pelaksanaan program sepenuhnya diberikan kepada dinas perdagangan dan perindustrian tanpa adanya campur tangan langsung dari dinas terkait dalam hal ini dinas koperasi dan umkm dan dinas tenaga kerja yang mana berdasarkan tugas pokok dan fungsi seharusnya mampu menjadi partner kerja dari dinas perdagangan dan perindustrian.

Program one village one product dilaksanakan secara penuh oleh dinas perindustrian dan perdagangan hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi yang terjalin antar dinas terkait berdasarkan keterikatan fungsi dan program kerja. Adapun dinas yang memiliki kedekatan serta integrasi tugas pokok dan fungsi dengan dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas koperasi dan UMKM serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas koperasi mampu menjadi mitra bagi dinas perindustrian dalam *program one village one product* dengan menjamin kelangsungan usaha masyarakat melalui program pengawasan dan pembiayaan usaha masyarakat, dimana telah diketahui bersama bahwa pembiayaan usaha masyarakat menjadi salah satu kunci dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha masyarakat kecil menengah begitu pula bagi industri kecil masyarakat. Selaras dengan hal tersebut dinas tenaga kerja dapat pula menjadi mitra dalam program ini dalam kaitan pemberian pelatihan dan pengembangan bagi pemilik maupun para tenaga kerja didalam sebuah industri kecil masyarakat. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu program kebijakan pemerintah tentu tidak hanya dapat dilakukan dalam lingkup internal namun juga dapat dilakukan dalam lingkup eksternal dalam hal ini kepada pihak swasta. Namun pelibatan sektor swasta dalam menunjang pelaksanaan program *one village one product* juga belum dapat terlaksana. Hal ini menjadi penegasan kemudian bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa sumber daya yang ada sangat terbatas dalam pelaksanaan program tersebut. Industri masyarakat yang tergabung dalam program *one village one product* di wilayah kabupaten Gowa secara spesifik di golongkan kepada 3 kategori yakni kategori industri pangan, industri kimia dan kerajinan serta industri mesin, logam dan, elektronika. Setiap kelompok industri tersebut di koordinir oleh masing-masing kepala seksi pada bidang perindustrian. Peran masing-masing kepala seksi di bidang perindustrian memiliki peranan penting dalam pengembangan industri masyarakat yang tergabung dalam program *one village one product*. Setiap kepala seksi membawahi dan menjadi koordinator langsung bagi setiap kelompok industri. Segala bentuk informasi terkait perkembangan program maupun proses pelatihan mitra industri akan dilaksanakan melalui perantara kepala seksi masing-masing. Tentunya proses pendampingan mitra industri dengan hanya mengandalkan masing-masing kepala seksi akan sangat menyulitkan mengingat mengingat setiap seksi industri mengkoordinir lebih dari satu mitra industri, terkhusus seksi pangan yang membawahi 20 mitra industri. Akan tetapi, perkembangan teknologi nampaknya menjadi salah satu kunci guna mempermudah koordinasi yang terjalin oleh setiap kepala seksi dengan masing-masing mitra industri.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsistennya implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Program One Village, One Product yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena terkendala dengan kenyataan dilapangan bahwa untuk menjalankan suatu program yang berpedoman hanya pada kebijakan ditingkat pusat tanpa adanya pedoman tersendiri (Perda) yang berimplikasi pada ketidaktahuan akan kebutuhan yang diperlukan pada pelaksana dilapangan

yang secara substansial kebijakan tersebut bersifat umum dan tidak mendetail berdasarkan ciri khas dan keadaan lingkungan social, ekonomi, dan politik di Kabupaten Gowa itu sendiri. Karena hal tersebut program one village, one product susah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan atau bahkan bantuan dalam bentuk pendanaan. Kekurangan informasi/ pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung. Belum adanya kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa mengenai Program One Village, One Product menyebabkan adanya ketidakjelasan prosedur pelaksanaan program tersebut sehingga menghambat jalannya program tersebut.

Disposisi dalam Implementasi

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam pedoman program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Disposisi pemerintahan yang kuat dan positif mencerminkan komitmen dan orientasi yang mendukung pemerintah dalam melayani masyarakat dengan baik, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Disposisi ini penting dalam membentuk budaya organisasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik dan efektif.

Sikap pelaksana terhadap suatu kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pengetahuan dan pemahaman dari seluruh instrument kebijakan sangat diperlukan karena dengan memahami tanggungjawabnya maka sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam menjalankan program One Village, One Product pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang memahami dan mengetahui program tersebut, sehingga sulit untuk melakukan alokasi sumber daya yang memadai. Pemerintah daerah tidak memahami sepenuhnya konsep dan tujuan dari program OVOP, sehingga kurang memberikan dukungan atau perhatian yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pemahaman dan pengetahuan yang kurang dari pemerintah daerah berdampak pada kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku industri lokal maupun masyarakat tentang program OVOP.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi

Menurut Edward, dua hal yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan organisasi ke arah yang lebih baik yakni SOP (Standap Operasional Pelayanan) dan Fragmentasi. SOP (Standar Operasional Pelayanan), keberadaan SOP diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyeragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya suatu kesamaan dalam menerapkan peraturan.

Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal

berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Terkait SOP (Standar Operasional Pelayanan) dalam implementasi program one village, one product di Kabupaten Gowa yang mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian, Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007, tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra. Regulasi ini sinergi dengan Visi Bupati Gowa dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian pula dengan Misi Bupati Gowa meningkatkan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal serta optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri Gowa.

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan yang terbagi dua wilayah 9 Kecamatan dataran rendah dan 9 Kecamatan dataran tinggi. Hal ini juga membedakan ketersediaan sumber daya lokal pada tiap Kecamatannya. Adapun implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa adalah pembentukan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai upaya pemerintah dalam mengelompokkan IKM yang menghasilkan produk sejenis atau melakukan proses pekerjaan yang sama. Dari sinilah bentuk pendekatan pengembangan pengelolaan potensi daerah pada suatu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan terbentuknya Sentra Industri Kecil Menengah ini yang kemudian menjadi terapan pengusulan program OVOP pada tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa.

Adapun Sentra IKM yang telah terbentuk dibawah binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, antara lain :

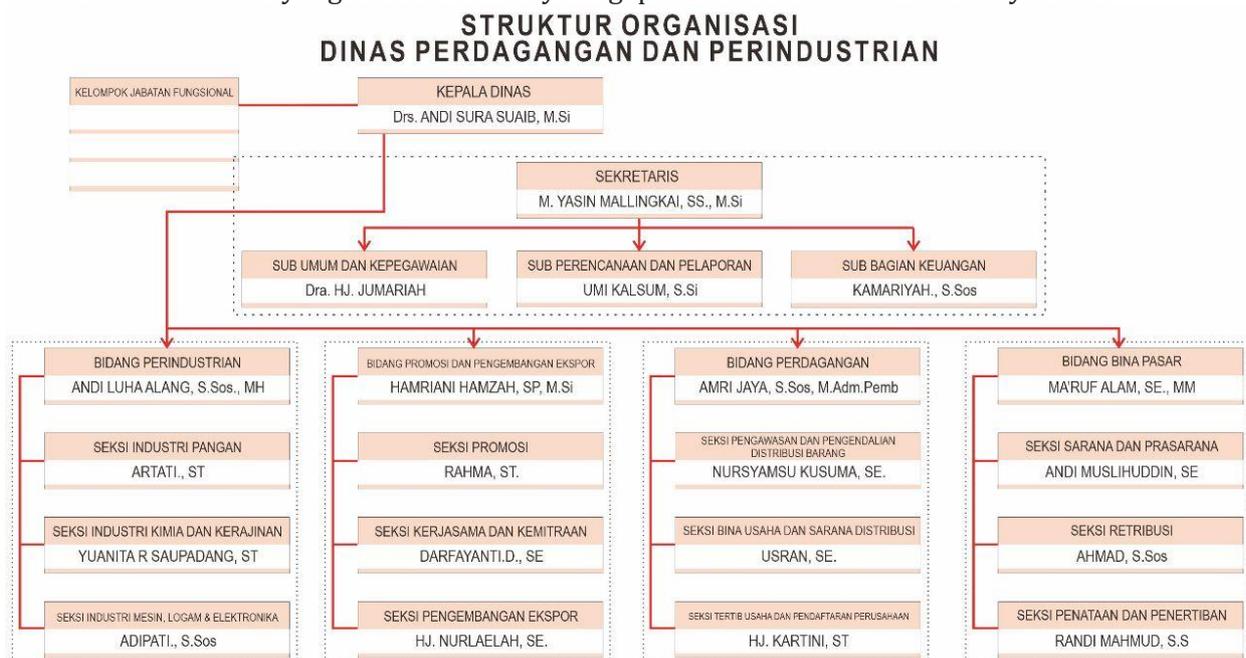
Table 1 Sentra IKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Gowa

No.	Sentra IKM	Komoditi	Lokasi
1.	Sentra Pengrajin Gula Merah	Gula Merah	Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong
2.	Sentra Pengrajin Gula Merah	Gula Merah	Desa Tassese, Kecamatan Manuju
3.	Sentra Batu Merah	Batu Bata	Kecamatan Bontonompo
4.	Sentra Pengrajin Anyaman	Kerajinan Daun Lontar	Kecamatan Bontonompo Selatan
5.	Sentra Kue Tradisional	Kue Tradisional	Sero, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu
6.	Sentra Pandai Besi	Parang, Sabit, Pacul, dll	Desa Jonjo, Kecamatan Parigi
7.	Sentra Pengrajin Gula Merah	Gula Merah	Dusun Bollangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang
8.	Sentra Kue Tradisional	Kue Tradisional (Bannang-bannang)	Kecamatan Bontolempangan
9.	Sentra Tepung Ganyong	Tepung Ganyong	Kecamatan Bungaya
10.	Sentra Pengolahan Komoditi Buah Markisa	Sirup dan Dodol Markisa	Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao
11.	Sentra Kopi	Kopi	Malino, Kecamatan Tinggimoncong
12.	Sentra Kue Tradisional	Kue Tradisional (Bannang-bannang)	Kecamatan Tompo Bulu
13.	Sentra Bubuk Kunyit	Bubuk Kunyit	Kecamatan Biring Bulu
14.	Sentra Pengolahan Komoditi Buah Markisa	Sirup dan Dodol Markisa	Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu

Sumber: Dasar hukum penerapan program One Village, One Product di Kabupaten Gowa

Program One Village, One Product yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena terkendala dengan kenyataan dilapangan bahwa untuk menjalankan suatu program yang berpedoman

hanya pada kebijakan ditingkat pusat tanpa adanya pedoman tersendiri (Perda) yang berimplikasi pada ketidaktahuan akan kebutuhan yang diperlukan pada pelaksana dilapangan yang secara substansial kebijakan tersebut bersifat umum dan tidak mendetail berdasarkan ciri khas dan keadaan lingkungan social, ekonomi, dan politik di Kabupaten Gowa itu sendiri. Karena hal tersebut program one village, one product susah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan atau bahkan bantuan dalam bentuk pendanaan. Tidak adanya peraturan khusus (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan menciptakan ketidakjelasan prosedur dalam melaksanakan program tersebut. Dalam pelaksanaan program OVOP, penting untuk memastikan adanya SOP yang jelas dan terstandarisasi untuk setiap tahapan program. Hal ini akan membantu memastikan bahwa program OVOP dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku industri lokal dan masyarakat.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
(Sumber : Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa)

Lokal Tapi Global dalam Implementasi Program *One Village One Product*

Lokal tapi global dalam implementasi program ovop mengacu pada kemampuan para pelaku industri lokal untuk mengembangkan produk lokal yang memiliki daya saing di pasar global. Dalam hal ini diperlukan beberapa hal untuk dapat mengembangkan produk lokal menjadi produk yang dapat diterima pasar global. *Pertama*, diperlukan adaptasi produk lokal dimana para pelaku industri lokal dapat mengadaptasi produk lokal mereka agar sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar global tanpa meninggalkan keunikan dan ciri khas atau identitas produk lokal yang dimiliki. Hal ini membutuhkan penyesuaian seperti desain, kemasan atau fitur produk agar lebih relevan dan menarik konsumen internasional.

Kedua, standar kualitas internasional yakni para pelaku industri lokal dapat meningkatkan standar kualitas produk mereka agar sesuai dengan persyaratan dan harapan pasar global. Hal ini melibatkan pemenuhan standar internasional dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. sertifikasi dan pengujian produk juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional terhadap produk lokal. *Ketiga*, pemasaran digital dan E-Commerce sangat diperlukan dalam era globalisasi digital, sebab produsen lokal dapat memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memasarkan produk mereka secara global. Dengan memanfaatkan teknologi digital, produsen loka dapat mencapai konsumen diseluruh dunia dan menjual produk secara langsung melalui platform e-commerce internasional. Penggunaan

strategi pemasaran digital yang efektif juga dapat membantu produk lokal mendapatkan eksposur global yang lebih luas.

Keempat, kemitraan dengan pasar ekspor dimana para pelaku industri dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan atau distributor yang memiliki akses ke pasar ekspor. Kemitraan ini dapat membantu memperluas jangkauan pasar produk lokal ke tingkat internasional dan memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah mapan. Dalam kemitraan ini para pelaku industri dapat belajar dari mitra mereka tentang persyaratan pasar global dan memenuhinya dengan baik. *Kelima*, inovasi produk dan riset pasar dimana para pelaku industri perlu melakukan inovasi produk secara terus menerus untuk menjaga daya saing dipasar global. Mereka harus memahami tren pasar global, melakukan riset pasar, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan preferensi konsumen. Inovasi dapat meliputi pengembangan produk baru, peningkatan kualitas atau penemuan cara baru untuk menggunakan bahan lokal. *Keenam*, promosi budaya dan warisan lokal merupakan salah satu keunikan produk lokal adalah aspek budaya dan warisan lokal yang terkandung didalamnya. Para pelaku industri lokal dapat mempromosikan budaya dan warisan lokal melalui pemasaran dan branding produk mereka. Hal ini dapat menarik minat konsumen internasional yang mencari produk dengan nilai-nilai budaya yang kaya dan autentik.

Pemerintah Kabupaten Gowa masih kurang inisiatif untuk membantu para pelaku industri yang dimana seharusnya peran pemerintah dalam mendorong terlaksananya program One Village, One Product ini ialah pemberian dukungan kepada para pelaku industri berupa mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mendukung implementasi program OVOP, seperti penyediaan insentif atau bantuan kepada pelaku usaha lokal, pelatihan dan pendampingan, menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung program OVOP, mempromosikan dan memasarkan produk-produk OVOP yang dihasilkan oleh para pelaku industri lokal. Untuk para pelaku industri lokal sudah menghasilkan produk unggulan dengan ciri khas dan keunikan dari daerahnya masing-masing. Namun untuk mengembangkan produktivitas dan pemasaran yang lebih luas dibutuhkan dukungan dari pihak pemerintah baik dalam bentuk pemberian modal tambahan, fasilitas yang dibutuhkan, promosi produk dan pemasaran yang lebih luas.

Kemandirian dan Kreativitas dalam Implementasi Program *One Village One Product*

Program "One Village One Product" (OVOP) adalah sebuah konsep pengembangan ekonomi lokal yang berasal dari Jepang. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa atau kawasan pedesaan dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan satu produk unggulan dari setiap desa atau kawasan tersebut.

Kemandirian dalam program OVOP mengacu pada kemampuan suatu desa atau kawasan untuk mengembangkan dan mengelola produksi produk unggulan mereka secara mandiri. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pengembangan sumber daya manusia lokal, pengembangan keterampilan produksi, pengaturan manajemen produksi dan distribusi, serta pembiayaan dan pemasaran produk. Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi, desa atau kawasan tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap faktor luar dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kreativitas juga memainkan peran penting dalam program OVOP. Dalam konteks ini, kreativitas melibatkan inovasi dalam pengembangan produk unggulan dan pemasaran. Desa atau kawasan didorong untuk menemukan cara baru dalam pengolahan bahan baku, perancangan produk, pengemasan, dan strategi pemasaran yang unik agar produk mereka lebih menarik dan bersaing di pasar. Kreativitas juga mendorong para pelaku lokal untuk mengidentifikasi peluang baru dan beradaptasi dengan perubahan dalam tren dan kebutuhan pasar.

Secara keseluruhan, kemandirian dan kreativitas merupakan dua faktor kunci dalam kesuksesan program "One Village One Product". Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi lokal dan mendorong kreativitas dalam pengembangan produk dan pemasaran, program ini dapat membantu masyarakat desa atau kawasan pedesaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Peran Pemerintah daerah yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa dalam menjalankan program One Village, One Product mengacu pada visi dan misi pemerintah

Kabupaten Gowa yakni Visi “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”, serta Misi “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan”. Namun dalam pelaksanaan dari visi dan misi tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, anggaran, infrastruktur, pelatihan atau fasilitas pendukung yang sangat mempengaruhi keberhasilan program OVOP.

Kemandirian dan kreativitas harus didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Namun kurangnya pelatihan yang seharusnya diadakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan menghambat perkembangan kemandirian dan kreativitas. Sebab Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap pelatihan yang relevan, para pelaku industri kurang mampu mengembangkan ide-ide kreatif dan mengelola usaha mereka dengan efektif. Pemerintah daerah Kabupaten Gowa kurang memberikan perhatian yang cukup dalam menjalankan program One Village One Product baik dalam hal pembuatan kebijakan yang khusus terkait OVOP, anggaran, maupun fasilitas pendukung agar para pelaku industri bisa mengembangkan hasil produksinya.

Kemandirian dan kreativitas memainkan peran penting dalam menjalankan program One Village One Product. Program OVOP yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan focus pada produk unggulan disetiap desa atau daerah. Dalam konteks ini kemandirian dan kreativitas dengan dukungan langsung dari pemerintah Kabupaten Gowa sangat penting karena para pelaku industri lokal perlu memiliki keterampilan, pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk menghasilkan, memasarkan dan menjual produk mereka secara luas. Serta kreativitas yang didukung dan dibina dengan baik akan meningkatkan nilai tambah produk lokal sebab melalui inovasi dan pengembangan produk yang kreatif pelaku industri dapat menciptakan diferensiasi dan keunggulan kompetitif, kemampuan untuk berfikir kreatif dan dapat melihat peluang baru untuk membantu para pelaku industri menghasilkan produk yang unik, menarik dan berkualitas tinggi yang akan meningkatkan daya saing produk lokal dipasar dan memperkuat ekonomi desa atau daerah.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Program *One Village One Product*

Pengembangan sumber daya manusia oleh pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan program One Village One Product (OVOP). Dimana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku industri lokal. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan membantu masyarakat desa atau daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan produk unggulan. Ini termasuk keterampilan produksi, manajemen usaha, pemasaran, desain produk, teknologi, dan lain sebagainya. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, masyarakat desa dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan efisiensi usaha.

Dalam menjalankan program One Village, One Product pemerintah daerah Kabupaten Gowa yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan dihadapkan oleh beberapa hambatan dalam pelaksanaan program OVOP diantaranya yang menjadi hambatan yakni pemerintah daerah Kabupaten Gowa keterbatasan anggaran yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program One Village, One Product. Sedangkan dalam mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, pelatihan, pembiayaan dan pendampingan membutuhkan dana yang cukup besar. Namun anggaran pemerintah daerah Kabupaten Gowa yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan terbatas, sehingga pemerintah kesulitan menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung program One Village, One Product dengan efektif.

Selain dari terbatasnya anggaran yang diperlukan, pemerintah Kabupaten Gowa yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak menjalin Kerjasama dengan berbagai dinas pemerintahan lainnya dalam menjalankan program One Village, One Product. Sedangkan Pengembangan sumber daya manusia dengan skala yang luas membutuhkan Kerjasama dan

koordinasi antara berbagai pihak terkait termasuk pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga keuangan, bahkan sector swasta. Tidak terjalannya Kerjasama dan sinergi antar pihak-pihak ini yang menghambat efektivitas implementasi program OVOP tersebut. Dalam pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Gowa membutuhkan orang-orang yang terampil dan berpengetahuan untuk mengembangkan produk unggulan, seperti keterampilan teknis, manajerial, pemasaran, dan desain produk yang akan mempengaruhi kualitas dan daya saing produk lokal agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang diperlukan untuk bersaing di pasar.

Dalam menjalankan program One Village, One product pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan membutuhkan Kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak agar program tersebut dapat berjalan efektif. Kurangnya staf atau personil yang memadai akan menghambat kemampuan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program OVOP. Diketahui bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu melibatkan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku industri untuk mengembangkan produk unggulan mereka. Kekurangan staf yang memadai bisa menghambat keterbatasan dalam memberikan pendampingan dan pelatihan yang diperlukan. Hal ini dapat menghambat pengembangan keterampilan dan peningkatan kualitas produk, serta mempengaruhi potensi kesuksesan program OVOP.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam program One Village, One product dalam penelitian ini menggunakan empat indikator. Keempat indikator tersebut sebagai berikut: *Pertama*, komunikasi. Komunikasi menjadi aspek penting dalam membangun pemahaman dan koordinasi yang baik terhadap program One Village One Product. Fakta dilapangan yang didapatkan terkait aspek komunikasi adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa mengenai program tersebut yang mengakibatkan ketidakjelasan prosedur pelaksanaan program. Dengan koordinasi yang baik, akan meningkatkan produktivitas industri. karena koordinasi yang baik berarti pembagian kerja yang jelas sehingga program tersebut bisa mencapai tujuan dan produktivitas industri juga meningkat. Program OVOP yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki peraturan yang pasti (Perda) untuk menjalankan program tersebut. Dimana program tersebut hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 78 tahun 2007 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industri kecil dan menengah melalui pendekatan satu desa satu produk. Berpedoman pada peraturan pusat yang hanya melihat kondisi umum, tidak secara mendetail yang dimana setiap daerah menghadapi kondisi dan situasi yang berbeda-beda disitulah pentingnya dibuatkan peraturan daerah yang mampu menampung atau mengkoordinir kondisi khusus daerah. *Kedua*, Sumber daya. Sumber daya merupakan factor penunjang keberhasilan pelaksanaan program One Village, One product di Kabupaten Gowa yang dibawah langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan jumlah pegawai 21 orang yang khusus menangani program OVOP. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program OVOP tidak bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas koperasi dan umkm dan dinas tenaga kerja yang mana berdasarkan tugas pokok dan fungsi seharusnya mampu menjadi partner kerja dari dinas perdagangan dan perindustrian. Dengan jumlah pegawai yang minim tersebut mengakibatkan tidak efektifnya program tersebut. *Ketiga*, disposisi. Disposisi yang merupakan watak dan karakteristik para implementor dalam pelaksanaan suatu kebijakan/ program. Dalam pelaksanaan program One Village, One Product pemerintah Kabupaten Gowa secara pengetahuan mengenai program OVOP masih sangat minim sebab dalam penerapan program tersebut masih banyak kekurangan seperti pemerintah yang kurang memahami kebutuhan dan potensi masyarakat Kabupaten Gowa sehingga sulit menentukan kriteria yang masuk dalam program One Village, One Product. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemerintah Kabupaten Gowa

dalam pelaksanaan program OVOP inilah yang menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keempat, Struktur Birokrasi. Peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program One Village, One Product di Kabupaten Gowa yakni mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian, Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007, tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra yang bersinergi dengan Visi dan Misi Bupati Gowa. Dalam pelaksanaan program One Village, One Product tidak terjalin Kerjasama antar dinas, dimana program tersebut hanya dilaksanakan oleh hanya satu dinas yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa sebagai penanggungjawab tunggal, namun program tersebut tidak berjalan maksimal karena tidak adanya peraturan daerah yang dibuat untuk mengatur program tersebut sesuai dengan situasi, dan kondisi, serta kebutuhan lapangan.

REFERENSI

- Akarberita.com (*one village one product*, program pemberdayaan desa di Gowa) pada 18 agustus 2020.
- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Ali, F., & Alam, S. (2012). *Studi kebijakan pemerintah*. Refika Aditama.
- Fred R. Schumann, PhD, (2016) University of Guam School of Business and Public Administration. *A Study of One village one product (OVOP) and Workforce Development: Lessons for Engaging Rural Communities around the World*.
- Haris, S. (2004). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .
- Nusantoro, J. (2011). *Model Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan klaster di Provinsi Lampung*. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1).
- Panduan operasional 2010. *Blue print one village one product*. Deputi bidang pengkajian sumber daya UKMK.
- Peraturan menteri perindustrian RI No. 78 tahun 2008 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industri UMKM melalui pendekatan OVOP .
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Thahir, B. (2019). *Kebijakan sosial dan otonomi daerah*. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91-102.
- Syafiie, I. K. (2022). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. (No Title).
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*.
- Yamazaki, J. (2010). *A Comparative Analysis of One Village One Product (OVOP) and its Replicability in International Development*. Institute of Social Studies.
- Yuliani, I. (2019). *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Uwais Inspirasi Indonesia*.